

Agama dan Masyarakat di Modjokuto (Pare), 65 Tahun Kemudian

Dari karya para Indonesianis Barat tentang Indonesia pada masa kemerdekaan, salah satu yang paling berpengaruh ialah *The Religion of Java (Abangan, Santri, Priyayi)*, karangan Clifford Geertz. Buku ini tidak hanya sangat mempengaruhi persepsi para ahli, wartawan, diplomat dan pembaca umum, tetapi juga berdampak terhadap cara orang Indonesia memahami diri mereka sendiri. Konsep Abangan dan Santri, dalam makna baru yang diberikan Geertz, mulai dipakai umum untuk menganalisa konflik sosial dan pergumulan politik. Presiden RI pertama, Sukarno, biasanya dijuluk abangan. Suharto dan jenderal-jenderal lainnya juga biasanya dianggap abangan, sekurang-kurangnya sampai sekitar 1990, ketika dia mulai menampakkan diri sebagai santri. Dan konflik terbesar dalam sejarah Indonesia modern, pembunuhan massal tahun 1965-66, sering juga dilihat melalui kacamata santri-abangan.

Dalam buku *After the Fact*, yang ditulisnya tiga puluh lima tahun kemudian (Clifford Geertz, *After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist* (Harvard University Press 1995), Geertz memberikan banyak informasi latar belakang tentang konteks penelitiannya yang mendasarkan *The Religion of Java* itu. Ia menjelaskan bagaimana tim peneliti dari Universitas Harvard – sepuluh orang, termasuk Geertz dan istrinya – secara kebetulan memilih kota Pare (‘Modjokuto’) sebagai lapangan penelitian mereka. Dengan melihat ke belakang, ia mengklaim bahwa konflik yang akan memuncak pada pembunuhan 1965-66 sudah mulai terasa pada 1952-54, masa penelitian lapangannya. Hasil pemilihan umum 1955 menunjukkan bahwa PKI memenangkan tiga perempat dari suara di kota Pare, dan partai NU mendapatkan tiga perempat dari suara di pedesaan. Secara nasional, perolehan suara kedua partai itu hanya 16,4 (PKI) dan 18,4 (NU) persen, jadi Pare agak menyimpang dari rata-rata. Pare tidak mewakili, tetapi Geertz merasa yakin bahwa kita tak memerlukan kasus yang sangat mewakili untuk memahami perkembangan sosial dan politik yang terjadi. Mungkin kasus ekstrim seperti Pare, di mana PKI dan NU jauh lebih kuat daripada rata-rata, sangat cocok untuk menunjukkan dinamika konflik yang terjadi pada skala besar di seluruh Indonesia.

Abangan, Santri dan Priyayi, dalam pandangan Geertz, merupakan tiga varian keagamaan di Jawa, dan tiga kelompok masyarakat yang cukup berbeda satu dengan lainnya. Masing-masing punya ritual pokok yang menentukan identitasnya: slametan bagi Abangan, *shalat* (sembahyang) bagi Santri, pertunjukan wayang bagi Priyayi. Masing-masing berkaitan dengan ruang lingkup sosial budaya dan lapangan kerja tertentu: desa, pasar dan birokrasi pemerintahan – tetapi Geertz mengaku bahwa di pasar kota ada juga pedagang kecil yang abangan, dan di desa terdapat juga santri (terutama petani kaya yang haji). Sangat boleh jadi adanya orang yang sembahyang secara teratur (seperti santri) tetapi juga suka menghadiri slametan (seperti abangan) dan nonton wayang (seperti priyayi); tiga macam ritual itu tidak saling bertentangan. Namun dalam analisa Geertz, Abangan, Santri dan Priyayi merupakan kelompok yang kompak dan saling terpisah.

Para Priyayi pada dasarnya terdiri dari para pejabat keraton, bangsawan dan pamong praja masa kolonial, dan budaya Priyayi adalah budaya yang berkembang di lingkungan keraton dan yang ditiru oleh golongan pamong praja berambisi. Geertz agaknya memasukkan semua pegawai negeri Republik Indonesia yang baru merdeka dalam kategori Priyayi ini.

Batas antara Abangan dan Santri lebih sulit ditentukan. Geertz jelas memakai istilah Santri dalam makna lebih luas daripada sekadar para murid dan lulusan pesantren; ia memaksudkan semua orang Islam yang sehari-hari menjalankan lima rukun Islam. Istilah yang sebelumnya lebih biasa dipakai ialah Putih. Sejarahwan Ricklefs pernah menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa pada abad ke-19 mengalami polarisasi, menjadi terpecah antara dua kubu yang disebut Putih dan Abangan (Merle C. Ricklefs, *Polarising Javanese society: Islamic and other visions (c.1830-1930)*, Singapore: NUS Press, 2007). Kaum Putih – dinamakan begitu karena pakaian serba putih yang merupakan ciri khas mereka – terdiri dari para pejabat agama, *kaum*, modin, lebe, juru kunci, haji, kiai dan santri. Desa-desanya Putih (desa perdikan, pesantren) pada awalnya merupakan kanton-kantong terisolir dalam lautan Abangan, tetapi sedikit demi sedikit mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan menyebarkan pelaksanaan lima rukun Islam. Dikotomi Santri-Abangan pada Geertz mirip dikotomi Putih-Abangan yang kita temukan pada penulis sebelumnya, tetapi golongan Santri lebih besar dan majemuk daripada sekadar kaum Putih. Santri Geertz yang khas adalah para pedagang pasar.

Geertz juga menekankan perbedaan antara Santri modern dan Santri kolot (yang lazimnya berafiliasi dengan partai Masyumi dan partai NU). Karena penelitiannya di kota dan tidak mencakup pedesaan, para Santri yang ia kenal adalah Santri modern. Konflik paling keras

yang dia amati ialah konflik antara Santri modern dan Abangan. Dan dapat dipertanyakan apakah perbedaan antara Abangan dan Santri kolot, pada zaman itu, juga begitu tajam; secara budaya mereka lebih dekat, dan di tingkat nasional NU kemudian mendukung konsep NASAKOM, yang ditolak keras oleh Masyumi. Dalam pembunuhan massal 1965-66, para korban memang terdiri dari Abangan dan kebanyakan pelaku adalah Banser NU, yakni Santri kolot, tetapi terdapat juga banyak kasus di mana Abangan yang takut dibunuh dilindungi oleh kiai dan masyarakat pesantren.

Pada awal masa Orde Baru (1966-1998), kaum Abangan masih merupakan mayoritas penduduk Jawa – dengan kata lain, mayoritas umat Islam terdiri dari kaum ‘Muslim statistik’ alias ‘Muslim KTP’ – dan pada dasawarsa 1990an orang mulai menyadari bahwa hampir tak ada Abangan lagi. Setelah kelengseran Suharto tidak muncul lagi organisasi yang secara eksplisit mewakili Abangan, Kejawen atau pun Aliran Kepercayaan. Kantong-kantong yang dulu dianggap sebagai benteng kuat kaum Abangan, sekarang didominasi NU dan Muhammadiyah atau malah gerakan Islamis mutakhir seperti Majelis Tafsir Alquran dan Salafi. Dengan melihat ke belakang, kita mencerna bahwa Orde Baru merupakan masa percepatan proses Islamisasi Indonesia, yang mencapai titik menentukan sekitar tahun 1990 dengan munculnya kubu ‘ABRI Hijau’ dalam angkatan bersenjata, lahirnya ICMI yang dibidani Habibie, dan ‘penghijauan’ Golkar dan semua jajaran birokrasi. Simbol-simbol Islam menjadi ‘trendy’ dan bagian wajib gaya hidup orang kota modern. Danyang-danyang dan banyak ritual desa ditinggalkan – dan tidak dihidupkan lagi pada masa pasca-Suharto.

Ada berbagai usaha untuk memahami dan menjelaskan proses hilangnya Abangan. Analisa Robert W. Hefner, pada hemat saya, yang paling meyakinkan ('Islamizing Java? Religion and politics in rural East Java', *The Journal of Asian Studies* 46, 1987, 533-554 dan 'Where have all the Abangan gone? Religionization and the decline of non-standard Islam in contemporary Indonesia' dalam Michel Picard and Rémy Madinier, editor, *The Politics of Religion in Indonesia*, New York: Routledge, 2011, hal. 71-91). Hefner menekankan dua faktor utama: ritual Abangan pada umumnya berkaitan dengan kekuatan spiritual yang bersifat local; kalau orang sering bepergian dari desanya, muncul kebutuhan akan perlindungan spiritual yang bersifat supra-lokal dan universal. Faham keTuhanan santri lebih sesuai kebutuhan orang yang mengalami mobilitas tempat dan status sosial. Faktor kedua, yang mungkin lebih menentukan lagi, ialah faktor tekanan politik. Setelah 1965-66 banyak Abangan, untuk menghindari dari tuduhan komunis, mencari perlindungan di bawah naungan salah satu agama yang diakui resmi. Ada yang masuk Kristen atau Katolik, ada yang menjadi Hindu atau

Budha, tetapi pada akhirnya yang paling banyak mencari perlindungan pada salah satu ormas Islam.

Masa Orde Baru juga merupakan masa perkembangan gerakan dakwah. Sebelumnya, dakwah dianggap sebagai usaha menyebarkan agama Islam kepada masyarakat dan golongan non-Muslim, tetapi gerakan dakwah modern memprioritaskan perbaikan aqidah dan ibadah kaum Muslim. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang didirikan Mohamed Natsir dan mantan pengurus Masyumi lainnya, memelopori dakwah dalam pengertian baru ini. Kemudian rezim juga ikut serta, dengan berdirinya Majelis Dakwah Islamiyah, di bawah naungan Golkar. Di kalangan militer, usaha Dinas Rohani ABRI untuk menanamkan nilai dan sikap ‘santri’ tidak kalah penting dan cukup efektif. Ormas-ormas Islam juga mendirikan lembaga dakwah masing-masing (seperti Majelis Tabligh Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah NU). Semua usaha dakwah itu berhasil benar-benar mengubah wajah masyarakat Indonesia. Kejawen dan aliran kepercayaan, yang tak punya lembaga kuat untuk memperkokoh keyakinan penganutnya, semakin terpinggirkan.

Menarik untuk melihat bagaimana dampak semua perubahan tersebut terhadap masyarakat kota dan pedesaan Pare, tempat penelitian Geertz 65 tahun lalu, yang waktu itu begitu kental budaya abangannya. Dalam buku ini, Amanah Nurish menyuguh banyak pengamatan menarik. Pesantren dan organisasi NU dari dulu punya peranan cukup dominan di wilayah Kediri–Pare, tetapi penulis menunjukkan bahwa spektrum variasi keagamaan tetap sangat luas. Perbedaan yang paling mencolok sekarang, agaknya, bukan lagi abangan-santri melainkan antara Islam ala NU di satu sisi, dan Muhammadiyah dan gerakan Islamis atau Salafi di sisi lain. Abangan juga tidak lenyap sama sekali: penulis bercerita tentang berbagai varian Islam Kejawen yang masih bertahan. Modjokuto – Pare sekali lagi merupakan contoh menarik untuk mempelajari dinamika agama dan budaya Indonesia masa kini.

Martin van Bruinessen

Utrecht, September 2018

